INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI
(IAIN) PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2018-2022
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 242 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2018-2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk pengembangan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu dibuat rencana strategis IAIN Pontianak;

b. bahwa rencana strategis IAIN Pontianak 2018-2022 telah disusun, perlu ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang rencana strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2018-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Agama, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Kerja sama pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Pengkalan data Pendidikan Tinggi;

12.Peraturan...

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama IAIN Pontianak.
18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2018-2022;

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketetapan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 ini menjadi salah satu acuan dalam perencanaan pengembangan Kampus IAIN Pontianak;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 September 2018

REKTOR,

Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001

Tembusan:
1. Kepala Biro AUAK;
2. Wakil Rektor III IAIN Pontianak;
3. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Biro AUAK IAIN Pontianak.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Ncgeri Pontianak

Nomor : 242 Tahun 2018
Tanggal : 03 September 2018
Tentang : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2018-2022

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2018-2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional", dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, yang tertuang dalam Permendiknas No.32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Depdiknas. dalam Renstra Depdiknas tersebut, tema pembangunan pendidikan Indonesia dibagi menjadi empat tema, yaitu:

Tabel 1

Tema-tema Pembangunan Pendidikan Indonesia

Tema pembangunan I(2005-2009)	: Peningkatan kapasitas dan
Tema pembangunan II (2011-2015)	: Penguatan layanan;
Tema pembangunan III (2015-2020)	: Penguatan daya saing regional;
Tema pembangunan IV (2021-2025)	: Penguatan daya saing internasional.

Selain itu pada 2015 diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 39 Rencana Strategis (Renstra) Kementeria Agama Tahun 2015-2019 yang antara lain berisikan tentang peningkatan akses dan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

(PTKIN) yang mencakup:

1. Aspek Kelembagaan
   a. Upaya peningkatan kuantitas, yang terkait dengan Angka Partisifasi Kasar (APK) yang menunjukkan tingkat partisifasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan pendidikan.
   b. Upaya Peningkatan Kualitas.
   c. Pengelolaan keuangan.
   d. Peningkatan kapasistas dosen.
2. Aspek kerjasama dengan:
   a. Lembaga di dalam negeri (daerah maupun nasional, pemerintah maupun swasta).
   b. Lembaga di luar negeri (misalnya JICA, AUSAID, ADB, *World Bank*, IDB, dan UNESCO).

Sebagai tindak lanjut KMA No: 39/2015, disusunlah Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan, yang antara lain berisikan:
   a. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
   b. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
2. Strategi
   a. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam.
   b. Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
   c. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI.
   d. Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI.
   e. Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI.

Arah kebijakan dan strategi di atas oleh Direktorat PTKI antara lain dituangkan dalam:

1. Program Reguler
   a. AICIS.
   b. Manajemen Perbaikan Tatakelola PTKI.
   c. Perkemahan Wirakarya.
   d. Peningkatan Sarpras melalui SBSN.

2. Program Unggulan
   a. Lima ribu doktor.
   b. *Visiting Professor* SES Jerman.
   c. Akselcrasi Guru Besar.
   d. Reformasi LPTK.
3. Program Terobosan
   a. KKN mahasiswa di Wilayah 3T.
   b. Pendirian UIII.
   c. Beasiswa untuk 5000 mahasiswa asing di PTKI.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang merupakan arah pengembangan pendidikan nasional dan Renstra Kemenag RI 2015-2019 dan Renstra Ditjen Pendis 2016-2019 menjadi acuan dalam reorientasi visi IAIN Pontianak. Dalam rangka menjamin tercapainya visi dimaksud, maka misi, tujuan dan sasaran dirumuskan dalam Renstra IAIN Pontianak 2015–2019, yang merupakan ***Midle Design*** pengembangan IAIN Pontianak.

Terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT) yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam otonomi perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena UU-PT ini memberikan kepastian mengenai kewenangan otonomi bagi perguruan tinggi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sesuai Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), selain perguruan tinggi sebagai Satker.

Saat ini, IAIN Pontianak masih sepenuhnya melaksanakan tata kelola SDM, tata kelola keuangan dan penyelenggaraan akademik berdasarkan Satker. Namun demikian, peluang pemanfaatan penganggaran dan penggunaan keuangan fleksibel, praktik-praktik yang sehat yang diberikan kewenangan dalam sistem Satker belum sepenuhnya dapat dioptimalkan oleh IAIN Pontianak dalam mencapai visi dan misinya. Salah satu solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan kewenangan ini adalah dengan mengarah kepada BLU melalui pembangunan system pendidikan dan pendukungnya yang terstandar yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan dan pelayanan yang adil, efektif, efisien, dan terukur, selanjutnya disebut pelayanan prima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tidak hanya program studi yang harus diakreditasi namun juga perguruan tinggi yang dikenal dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi maupun program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi merupakan salah satu penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh pemerintah atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu, kapasitas penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menentukan kelayakan program atau satuan pendidikan. Saat ini (2018) IAIN Pontianak belum terakreditasi secara institusi.

Untuk mendapatkan pengakuan pada tingkat regional, maka sistem pengelolaan juga harus mengacu pada sistem pengelolaan yang dapat diterima pada tingkat regional maupun internasional. Salah satu penyelenggara sertifikasi perguruan tinggi untuk tingkat regional yaitu ASEAN *University Network* (AUN). Akreditasi BAN-PT dan sertifikasi AUN memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Perpaduan kedua standar pengelolaan satuan pendidikan ini diharapkan dapat menguatkan sistem pengelolaan akademik dan non-akademik di IAIN Pontianak menuju "IAIN Pontianak yang ulung".

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan upaya pemenuhan standarisasi pengelolaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT dan AUN dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam RIP, isu-isu strategis nasional serta kondisi terkini IAIN Pontianak. Berdasarkan isu dan kondisi tersebut, ditentukan arah, kebijakan, dan program IAIN Pontianak untuk empat tahun ke depan (2018-2022) sehingga diharapkan pelayanan prima pada seluruh *stakeholder* tercapai dan peningkatan kualitas lulusan yang dari waktu ke waktu terus dilakukan secara konsisten.

B. Dasar Hukum

1. UUD 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang "Sistem Pendidikan Nasional".
2. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang "Visi Indonesia Masa Depan".
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional".

4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".
5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang "Pendidikan Tinggi".
6. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang "Standard Nasional Pendidikan".
7. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang "Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan".
8. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
9. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi".
10. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia".
11. Perpres Nomor 53 Tahun 2013 tentang "Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak".
12. Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang "Organisasi Kementerian Negara".
13. Perpres Nomor 83 Tahun 2015 tentang "Kementerian Agama".
14. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 tentang "Rencana Strategis Depdiknas".
15. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang "Standard Nasional Pendidikan Tinggi".
16. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang "Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi".
17. PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang "Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama".
18. PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang "Pelayanan Publik di Kementerian Agama".
19. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang "Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat".
20. PMA Nomor 51 Tahun 2015 tentang"Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak".
21. KMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang "Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019".
22. KMA Nomor 54 Tahun 2017 tentang perubahan atas PMA Nomor 94 Tahun 2013 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontanak".

23. KMA Nomor B.II/3/18302 tanggal 5 Juni 2018 tentang "Penunjukan Rektor IAIN Pontianak".
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Pendidikan Nasional 2005-2025.
25. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
26. Program Reguler, Unggulan, dan Terobosan Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
27. Rencana Strategis IAIN Pontianak Tahun 2015 – 2019.

C. Kerangka Pikir Penyusunan

Tahapan pengembangan IAIN Pontianak berdasarkan RIP, menekankan peningkatan daya saing pada level nasional periode I (2018-2022) sebelum menuju daya saing regional pada periode II dan III (2022-2030) serta internasional pada periode IV dan V (2030-2038). Untuk mencapai arah pengembangan tersebut, maka kinerja dan mutu pelayanan IAIN Pontianak tidak hanya harus diupayakan memenuhi standar nasional tetapi juga mulai harus diarahkan pada tercapainya standard regional/ internasional pengelolaan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perumusan Renstra ini tidak hanya mengacu pada standar pengelolaan nasional yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetapi juga mengacu pada standard regional yaitu dari ASEAN *University Network Quality Assurance* (AUN-QA). Secara umum kerangka berpikir sistem pengelolaan IAIN Pontianak pada periode 2018-2022 digambarkan pada skema berikut ini.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penyusunan Renstra IAIN Pontianak 2018-2022

Dalam RIP IAIN Pontianak 2018-2038 dicantumkan scenario pengembangan IAIN Pontianak sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel 1
Skenario Pengembangan IAIN Pontianak

TAHAP	LEVEL TARGET				ARAH
	NASIONAL	REGIONAL	DUNIA		
	BAN-PT	AUN-QA	ISESCO	ISO	
PERTAMA (2018-2022)	Terakreditasi "B"	Inisiasi	-	-	*Good University Governance*
KEDUA (2022-2026)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	Terakreditasi	Inisiasi	-	*University's Performance Improvement*
KETIGA (2026-2030	Terakreditasi "A" (ULUNG)	ULUNG	Terakreditasi	Inisiasi	*Competitive Advantages University*
KEEMPAT (2030-2034)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	ULUNG	ULUNG	Terakreditasi	*Global Recognition University*
KELIMA (2034-2038)	Terakreditasi "A" (ULUNG)	ULUNG	ULUNG	ULUNG	

CATATAN: Ulung = Unggul

Tabel di atas memperlihatkan akreditasi sebagai tonggak-tonggak dari pencapaian visi IAIN Pontianak yang ulung, dimulai dengan akreditasi nasional dari BAN-PT, akreditasi regional dari AUN-QA, hingga akreditasi internsional dari ISESCO dan ISO. Akreditasi merupakan suatu upaya untuk menilai dan menentukan status kualitas perguruan tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan kemudian diumumkan kepada masyarakat. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan tujuh standar, yaitu:

1. Standar 1 : Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.
2. Standar 2 : Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu.
3. Standar 3 : Mahasiswa dan lulusan.
4. Standar 4 : Sumber daya manusia.
5. Standar 5 : Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
6. Standar 6 : Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi.
7. Standar7 : Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Untuk mampu masuk dalam persaingan regional maka institusi harus mendapatkan pengakuan (sertifikasi) mutu dari lembaga internasional seperti ASEAN *University Network* (AUN). AUN adalah sebuah organisasi jejaring universitas di ASEAN yang mempunyai tujuan utama untuk memperkuat dan memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi antarnegara Asean. Ada empat perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi anggota AUN yaitu UI, UGM, ITB, dan UNAIR. Menjadi anggota AUN merupakan salah satu upaya untuk memastikan IAIN Pontianak bekerja sesuai visi dan misinya. Kerangka Standar Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pergurun Tinggi yang ditetapkan oleh AUN dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan Kerangka Standar Pengelolaan Peningkatan Mutu Layanan Akademik disajikan dalam Gambar 3 yang dimuat dalam *ASEAN University Network Quality Assurance* (AUN-QA).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IAIN Pontianak, strategi yang akan dilakukan adalah menerapkan kebijakan anggaran dengan lima elemen pengembangan strategis, yaitu (1) elemen pendidikan, (2) elemen penelitian, (3) elemen pengabdian kepada masyarakat, (4) elemen pengembangan perencanaan, kerjasama dan sistem informasi, serta (5) elemen tata kelola. Lima elemen pengembangan ini sesuai dengan nafas dari UU-PT No. 12 tahun 2012, yaitu (1) perluasan dan jaminan akses, (2) pengembangan tri dharma secara utuh, (3) kesetaraan, (4) keutuhan jenjang pendidikan, (5) otonomi, dan (6) sistem penjaminan mutu.

Gambar 2
Kerangka Standar Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi
(*Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA))

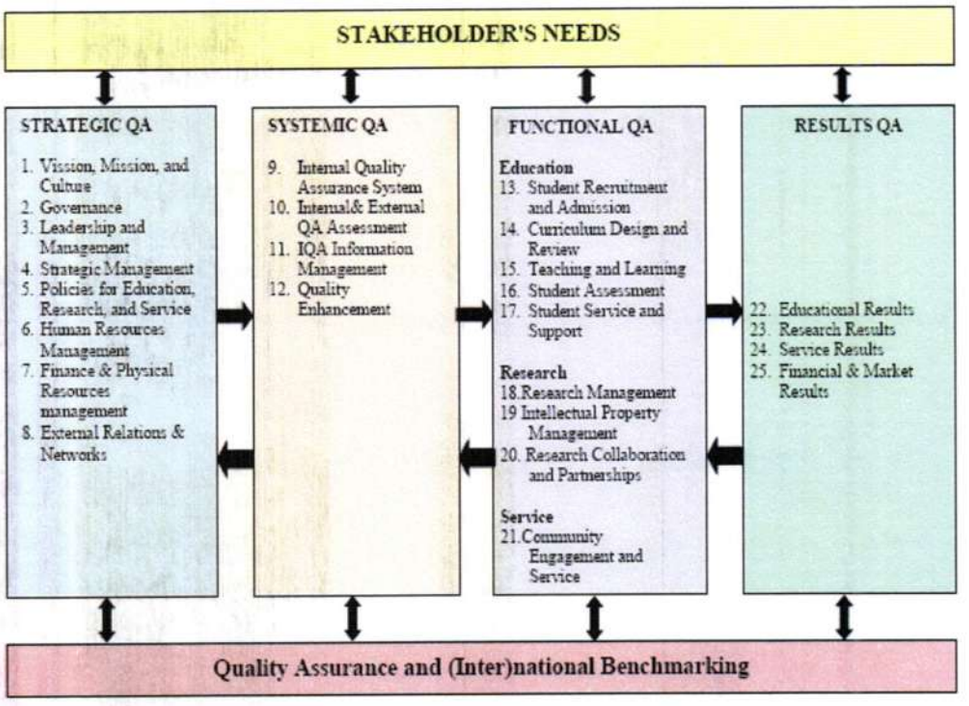

Gambar 3
Kerangka Standar Pengelolaan Peningkatan Mutu Layanan Akademik
(*Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA))

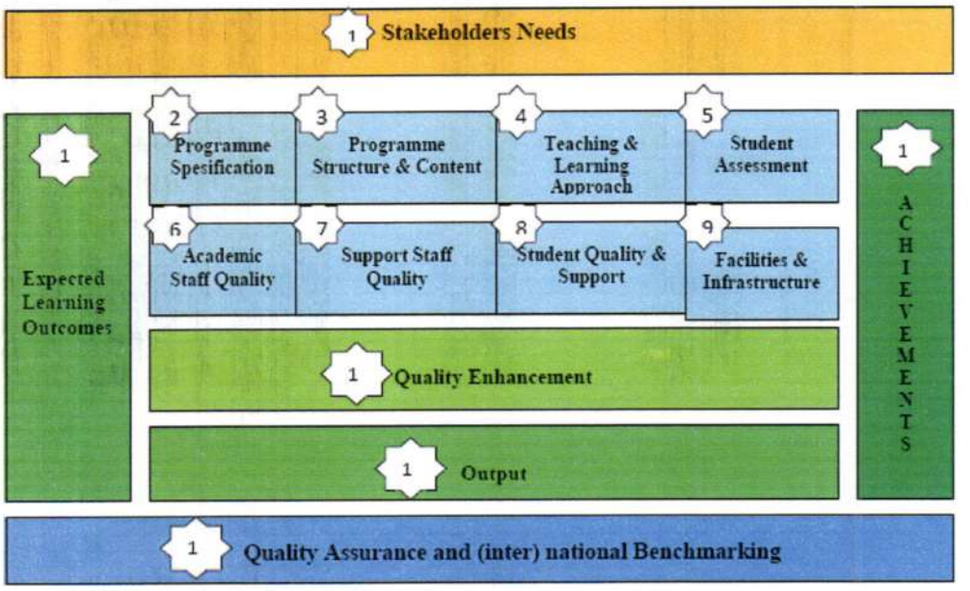

Secara umum, luaran utama dari Rencana Strategis yang dikembangkan pada masa jabatan Rektor 2018–2022 yaitu, **Luaran Akademik**: IAIN Pontianak menjadi pusat pengembangan keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo yang kuat dalam mengekplorasi dan memanfaatkan sumber daya local dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, professional dan berbudaya, serta berdaya saing regional; **Luaran Layanan yang Prima**: IAIN Pontianak

dapat mewujudkan kinerja layanan yang adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi. Tingkat keberhasilan atau kinerja institusi dalam mencapai sasaran ataupun luaran dari pelaksanaan rencana strategis tercermin dalam akreditasi institusidan program studi (BAN-PT) serta inisiasi sertifikasi AUN.

D. Isi/Ruang Lingkup

Pada dasarnya isi/ruang lingkup Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 1 mengenai kerangka pikir penyusunannya. Secara lebih rinci isi/ruang lingkup Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 ini dapat dilihat pada Daftar Isi yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kerangka Pikir Penyusunan
- D. Isi/Ruang Lingkup
- E. Proses Penyusunan

BAB II FALSAFAH, NILAI DASAR, PRINSIP DASAR, TUJUAN, SASARAN, DAN MOTTO

BAB III KONDISI OBJEKTIF IAIN PONTIANAK SAAT INI
- F. TRIDHARMA yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- G. KELEMBAGAAN yang mencakup perencanaan, kerjasama (lokal, nasional, regional, dan internasional), sistem informasi, dan tata kelola.
- H. TATA KELOLA yang mencakup birokrasi, administrasi dan kepemimpinan, mahasiswa dan lulusan/alumni, sumber daya manusia (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya), keuangan, sarana dan prasarana.

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS
- A. UMUM, yang mencakup kebijakan Kabinet Kerja di Sektor Pendidikan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kemristekdikti.

B. KEMENTERIAN AGAMA, yang mencakup Renstra Kemenag, Renstra Ditjen Pendis, dan Program Reguler, Unggulan, serta Terobosan Direktorat PTKI.

BAB V ARAH, KEBIJAKAN STRATEGIS, DAN PROGRAM IAIN PONTIANAK 2018-2022

E. Proses Penyusunan

Penyusunan Renstra IAIN Pontianak dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Pimpinan IAIN Pontianak untuk tanggap darurat penyusunan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022.
2. Penerbitan Surat Keputusan Rektor mengenai Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional IAIN Pontianak 2018-2022.
3. Rapat Tim untuk pembagian tugas dan penentuan jadual kerja.
4. Persiapan yang berupa pengkajian referensi dan pengumpulan data.
5. Penyusunan Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 masing-masing bab.
6. Sinkronisasi antar bab (Versi 1).
7. Presentasi dan pembahasan yang melibatkan LPM IAIN Pontianak.
8. Revisi pertama (Versi 2).
9. Presentasi dan pembahasan yang melibatkan Pimpinan IAIN Pontianak.
10. Revisi kedua (Versi 3).
11. Pemeriksaan plagiarism.
12. Revisi ketiga (Versi 4) dan pembuatan *booklet*.
13. Penerbitan Surat Keputusan Rektor IAIN Pontianak tentang "Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022".

II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DASAR, PENDEKATAN DAN MOTTO KERJA

A. Visi dan Misi Kepemimpinan 2018-2022

1. **Visi** kepemimpinan 2018-2022 adalah, "Terwujudnya kepemimpinan kolegial yang mengedapankan profesionalitas dan komitmen bersama untuk mewujudkan IAIN Pontianak yang ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo".

2. Misi:

a. Mengembangkan manajemen yang berbasis komitmen bersama (*common platform*).

b. Membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Mengembangkan sistem pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang berkemampuan holistik (*spiritual, emotional,* dan *intellectual*).

d. Mewujudkan IAIN Pontianak sebagai rumah kedua (*homey*) dengan mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 adalah untuk:

1. Memantapkan posisi dan citra IAIN Pontianak di tingkat lokal dan nasional serta regional.
2. Meningkatkan peran IAIN Pontianak melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian keislaman, keilmuan, dan kebudayaan Borneo, serta mengabdikannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
4. Meningkatkan kinerja IAIN Pontianak melalui organisasi, birokrasi, dan tata kelola yang lebih baik.
5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak demi pemerataan akses pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

C. Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Strategis IAIN Pontianak 2018-2022 adalah:

1. Terakreditasinya IAIN Pontianak oleh BAN-PT dengan peringkat minimal B dan siapnya IAIN Pontianak untuk akreditasi dari lembaga akreditasi regional (AUN-QA).
2. Meningkatnya budaya akademis serta kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kajian keislaman, keilmuan dan budaya Borneo, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

3. Dihasilkannya lulusan yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
4. Meningkatnya kinerja IAIN Pontianak melalui organisasi, birokrasi, dan tata kelola yang lebih baik sebagai suatu Zona Integritas (ZI) yang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
5. Meningkatnya kerjasama IAIN Pontianak dengan berbagai pihak untuk menangani berbagai masalah baik lokal, nasional, regional, dan internasional.

D. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dikedepankan di IAIN Pontianak adalah **QALBU:**

1. *Qualified* (profesional).
2. *Accountable* (bertanggung jawab dan transparan).
3. *Liable* (tanggung gugat).
4. *Based on Collegiality* (berbasis kolegial).
5. *Understanding* (kesepahaman dan komitmen bersama).

E. Pendekatan

Pendekatan kepemimpinan IAIN Pontianak 2018-2022 adalah **SMART**:

1. *Spesific* (sasaran dan tujuan disusun secara spesifik).
2. *Measurable* (hasil pencapaian yang terukur).
3. *Attainable* (ketercapaian yang memiliki standar/*benchmarking*).
4. *Result Oriented* (berorientasi pada hasil yang diunggulkan).
5. *Time Bound* (terlaksana sesuai target waktu).

F. Motto Kerja 2018-2022

Motto kerja IAIN Pontianak 2018-2022 adalah, "Pengabdian berbasis kinerja *dan akhlaq al-karimah*, kebersamaan dan kekompakan, yang berorientasi pada prestasi dan kemajuan IAIN Pontianak". Kinerja yang dimaksudkan di atas adalah hasil kerja yang:

1. Berbasis tusi.
2. Berbasis aturan
3. Berbasis koordinasi.
4. Transparan.
5. Terukur.

6. Dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dan dengan motto ini maka:

1. Rugilah civitas akademika IAIN Pontianak yang tidak berniat ibadah (pengabdian) dalam bekerja.
2. Mulialah civitas akademika IAIN Pontianak yang kinerjanya diwujudkan dengan *akhlaq al-karimah*.
3. Kebersamaan akan merajut kekompakan civitas akademika IAIN Pontianak.
4. Kekompakan civitas akademika IAIN Pontianak menjadi fondasi untuk mengukir prestasi.
5. Seindah-indahnya prestasi adalah kemajuan IAIN Pontianak.

III. ISU-ISU STRATEGIS

A. Umum

1. **Kebijakan Sektor Pendidikan Kabinet Kerja**

Nawacita kebijakan kabinet kerja yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime.
b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program

"Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional schingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

2. Renstra Kemristekdikti

Dalam UURI Nomor 20Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional", dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkank emampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selainitu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025, yang tertuang dalam Permendiknas No. 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Depdiknas. Didalam Renstra Depdiknas tersebut, tema pembangunan pendidikan Indonesia dibagi menjadi empat tema, yaitu:

Tabel 1
Tema-tema Pembangunan Pendidikan Indonesia

Tema pembangunan I (2005-2009)	:Peningkatan kapasitas dan
Tema pembangunan II (2011-2015)	:Penguatan layanan;
Tema pembangunan III (2015-2020)	:Penguatan dayasaingregional;
Tema pembangunan IV (2021-2025)	:Penguatan daya saing internasional.

B. Kementerian Agama

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 39 Rencana Strategis (Renstra) Kementeria Agama Tahun 2015-2019 yang antara lain berisikan tentang peningkatan akses dan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang mencakup:

1. Aspek Kelembagaan
   e. Upaya peningkatan kuantitas, yang terkait dengan Angka Partisifasi Kasar (APK) yang menunjukkan tingkat partisifasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan pendidikan.
      1) Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.
      2) Pembukaan fakultas dan program studi baru.
      3) Penambahan kapasitas ruang kelas baik dengan rehabilitasi maupun pembangunan ruang kuliah baru.
   f. Upaya Peningkatan Kualitas
      1) Mengupayakan pengakuan dari lembaga/badan sertifikasi nasional (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi).
      2) Mengupayakan pengakuan dari lembaga/badan sertifikasi regional (ASEAN *University Network – Quality Assurance*).
      3) Mengupayakan pengakuan dari lembaga/badan sertifikasi internasional (*International Organization for Standardization dan Webometrics*).
   g. Pengelolaan keuangan
      1) Satuan Kerja (Satker).
      2) Badan Layanan Umum (BLU).
   h. Peningkatan kapasistas dosen
      1) Pemberian beasiswa dalam dan luar negeri.
      2) Menyelenggarakan program *Academic Recharging for Islamic Higher Education*, *Sandwich Program*, dan *International Conference*.

3) Sertifikasi dosen.

2. Aspek kerjasama dengan:
   a. Lembaga di dalam negeri (daerah maupun nasional, pemerintah maupun swasta).
   b. Lembaga di luar negeri (misalnya JICA, AUSAID, ADB, World Bank, IDB, dan UNESCO).

C. Renstra Ditjen Pendis

Sebagai tindak lanjut KMA No: 39/2015, disusunlah Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan, yang antara lain berisikan:
   a. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
      1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan.
      2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan.
      3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan.
      4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan.
   b. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
      1) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
      2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.
      3) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu.
      4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi.
      5) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik.

6) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel.
8) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

2. Strategi
   a. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
      1) Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, on-going 2 semester dan on-going 1 semester.
      2) Pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa.
      3) Pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
      4) Pemberian beasiswa *Tahfidz al-Qur`an.*
      5) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 (*fresh graduate*) untuk melanjutkan pendidikan S2.
      6) Pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan.
      7) Penyeleksian mahasiswa baru.
      8) Peningkatan PTKIN penerima BOPTN.
      9) Pendirian PTKI baru.
      10) Pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.
   b. Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa:
      1) Peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN.
      2) Pemberian fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN.
      3) Peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN.
      4) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan.
      5) Peningkatan mutu akademik PTKIN.
      6) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI.

7) Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS.
8) Penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI.
9) Pengikutsertaan PTKI pada program Standar Manajemen Nasional dan Internasional.
10) Mendorong penyelenggaraan enterpreuncurship pada beberapa lembaga.
11) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan.
12) Pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU.
13) Mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI.
14) Penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI.
15) Penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI.
16) Pembinaan bagi kopertais.
17) Penguatan kelembagaan LPTK.

c. Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa:
1) Sertifikasi dosen.
2) Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS.
3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Peningkatan kompentensi dosen.
5) Pemberian fasiltas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
7) Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presantasi makalah AICIS.
8) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
9) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2.
10) Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK.

d. Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa:
1) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI.
2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (ter-*index* Scopus).
4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
5) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI.

6) Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman Islam *rahmatan lil `alamin.*
7) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.

e. Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa:
1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi.
2) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional.
3) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan (PMA No. 55/2014).
4) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil `alamin.*

3. Program Unggulan Direktorat Diktis

Arah kebijakan dan strategi di atas oleh Direktorat PTKI antara lain dituangkan dalam:

a. Program regular.
1) AICIS.
2) Manajemen perbaikan tata kelola PTKI.
3) Perkemahan wirakarya.
4) Peningkatan sarana dan prasarana melalui SBSN.

b. Program unggulan
1) Lima ribu doktor.
2) *Visiting Professor* SES Jerman.
3) Akselerasi Guru Besar.
4) Reformasi LPTK.

c. Program Terobosan
1) KKN mahasiswa di Wilayah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal).
2) Pendirian UIII.
3) Beasiswa untuk 5000 mahasiswa asing di PTKI.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang merupakan arah pengembangan pendidikan nasional dan Renstra Kemenag RI 2015-2019 dan Renstra Ditjen Pendis 2016-2019 menjadi acuan dalam reorientasi Visi IAIN Pontianak. Dalam rangka menjamin tercapainya visi dimaksud, maka misi, tujuan dan sasaran dirumuskan dalam Renstra IAIN Pontianak 2015–2019, yang merupakan ***MidleDesign*** pengembangan IAIN Pontianak.

IV. KONDISI OBJEKTIF IAIN PONTIANAK

A. Gambaran Historis dan Dinamika IAIN Pontianak

Di awal pendiriannya, IAIN Pontianak merupakan IAIN filial dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara historis, pendirian IAIN Pontianak bermula dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama tentang pembentukan Dewan Kurator Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak. Saat itu, terpilihlah Brigadir Jenderal Kadarusno yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalbar sebagai Ketua dan Mochammad Barir, SH yang saat itu menduduki jabatan Walikota Pontianak, sementara Drs. H. Moh. Ardani selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak di posisi Sekretaris. Kecuali itu, secara struktur ada 12 orang anggota. Tercatat nama 12 orang anggota, nama M. Yusuf Syu'aib, Drs. H. Suegeng, Drs. Batar Batubara, Moh. Damiri, Chatib Syarbaini, Syaikh Abdurrani Mahmud, Tan Abdullah, Drs. Tammar Abdul Salam, Drs. Abdul Rasyid, Usman Samad, BA, dan Ir. Said Ja'far. Dewan Kurator tersebut dibentuk berdasarkan SK yang fungsinya sebagai Dewan Penyantun keperluan/kebutuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang Pontianak.

Setelah lima belas tahun, berdasar pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tertanggal 21 Maret 1997 (bertepatan tanggal 12 Dzulqaidah 1417) Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak bersama 32 Fakultas IAIN lainnya di seluruh Indonesia mengalami alih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak. Tentunya, alih status ini berpengaruh pada kewenangan penuh bagi STAIN Pontianak dalam menyelenggarakan, melakukan pengelolaan, termasuk merumuskan visi dan misinya sendiri atau memperoleh kesempatan untuk mandiri dan tidak bergantung lagi kepada IAIN Induk (Syarif Hidayatullah Jakarta). Dalam perkembangan berikutnya STAIN Pontianak mengalami

alih status menjadi IAIN Pontianak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013, yang diundangkan di dalam lembar negara Nomor 123 tanggal 6 Agustus. Dengan alih status menjadi IAIN Pontianak, IAIN Pontianak makin berbenah. Pasca alih status sampai saat ini, terdapat tiga fakultas di IAIN Pontianak yang terdiri dari 16 Program Studi di jenjang Sarjana (S1) dan sebuah Program Pasca Sarjana (S2) yang terdiri dari 2 Program.

Adapun program Studi pada jenjang sarjana di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ada empat, yaitu: (1) Pendidikan Agama Islam (PAI), (2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA), (3) Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), (4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Pada fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) terdapat enam program studi, antara lain; (1) Ekonomi Syariah (ES), (2) Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (HES), (3) Perbankan Syariah (PBS), (4) Hukum Keluarga Islam/*Ahwal Syakhshiyyah* (AS), (5) Akuntansi Syariah (AKS), dan (6) Manajemen Bisnis Syariah (MBS). Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah memilki enam program studi, yaitu: (1) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), (2) Manajemen Dakwah (MD), (3) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), (4) Ilmu al-Quran dan Tafsir (IAT), (5) Studi Agama-Agama (SAA), dan (6) Psikologi Islam (PI). Di Jenjang Program Pascasarjana (S2), terdapat dua program studi, yaitu (1) Pendidikan Agama Islam (PAI), dan (2) Ekonomi Syariah (ES).

B. IAIN Pontianak dalam Grafis

Gambar 4
Banyaknya Program Studi di IAIN Pontianak

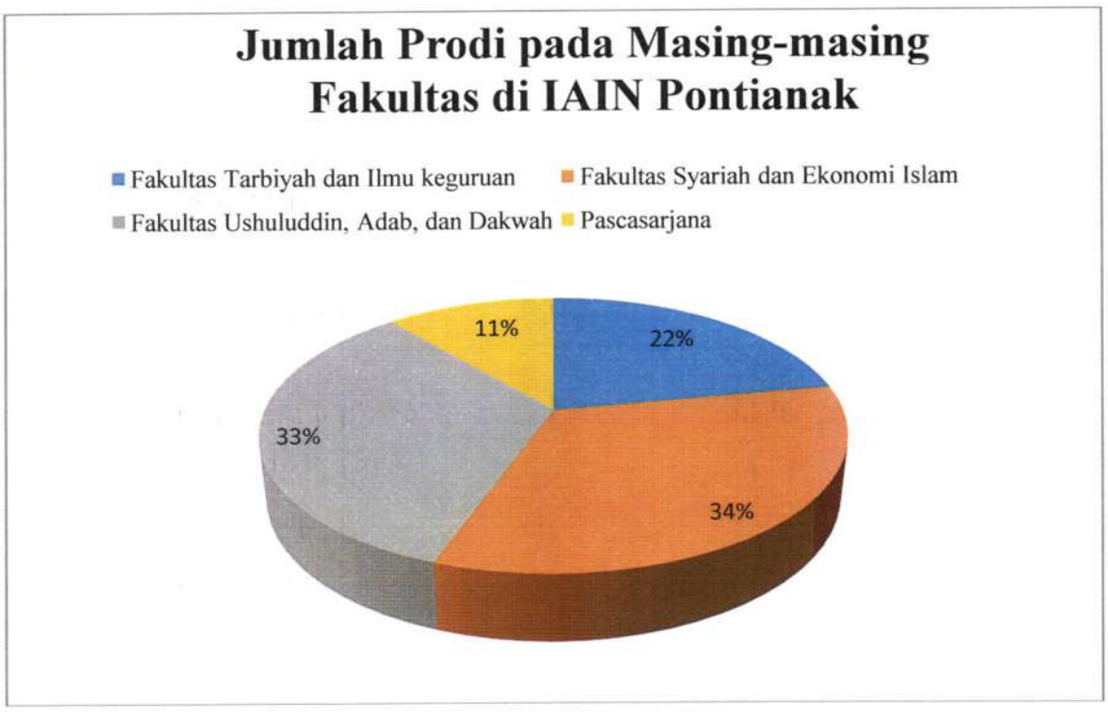

Gambar 5
Status Akreditas Masing-masing Program Studi

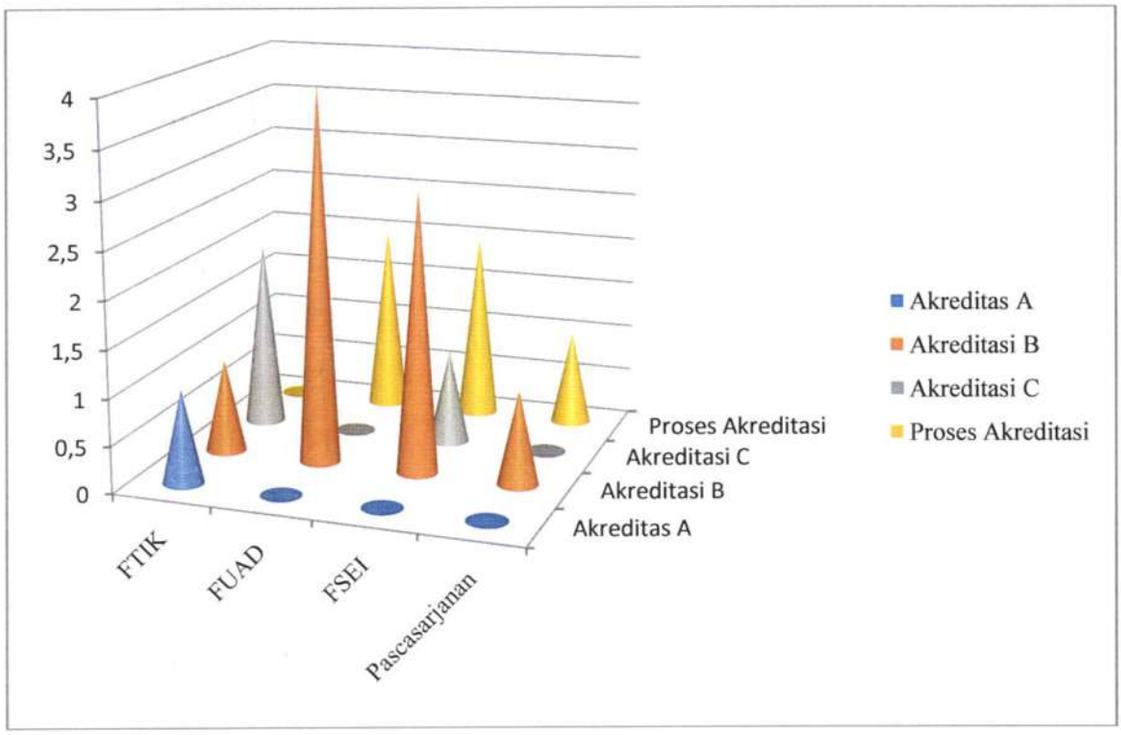

Gambar 6
Kualifikasi Jenjang Pendidikan Dosen IAIN Pontianak

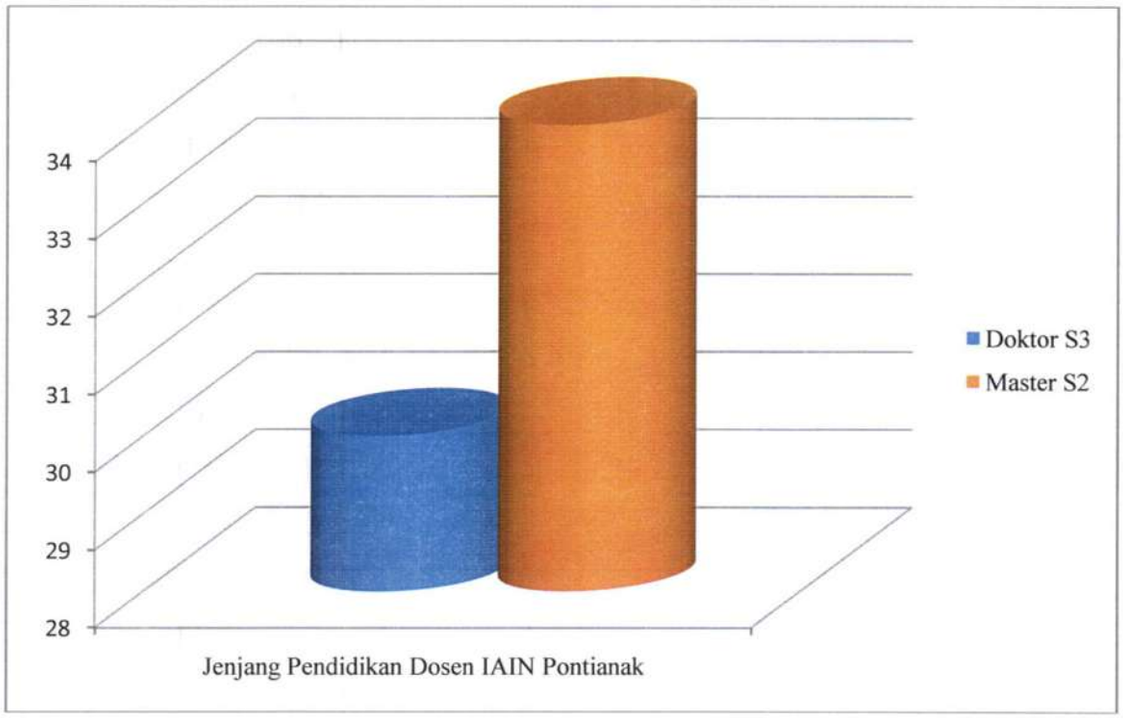

Gambar 7
Jabatan Fungsional Dosen IAIN Pontianak

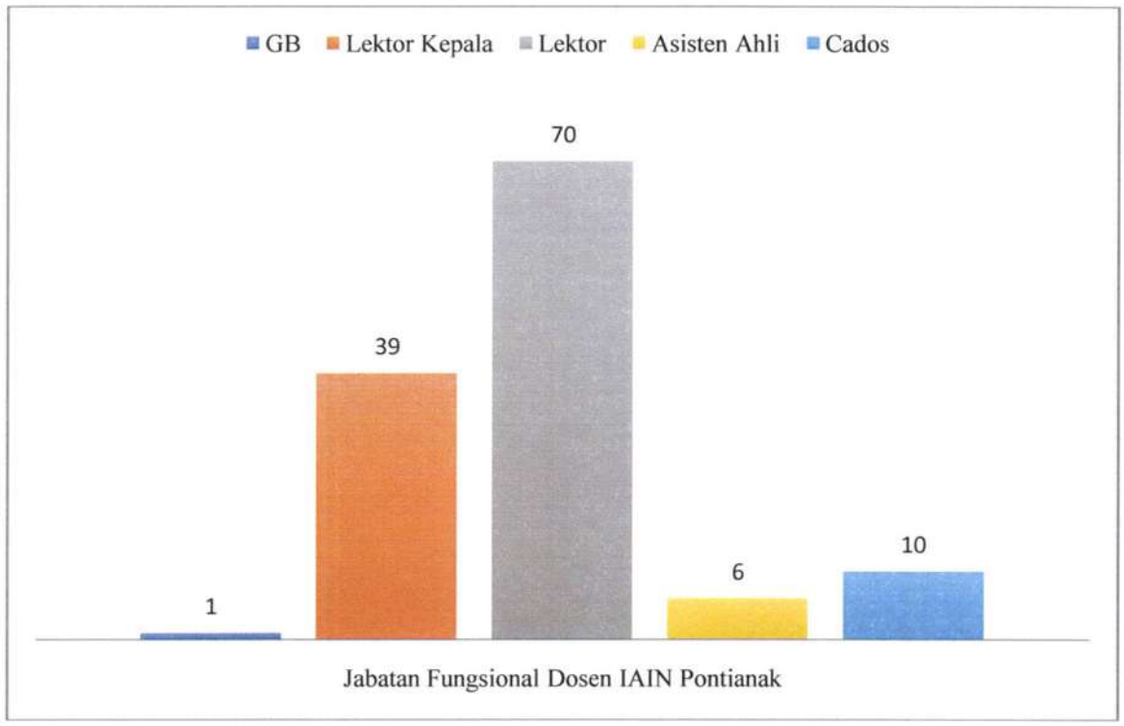

Gambar 8
Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan IAIN Pontianak

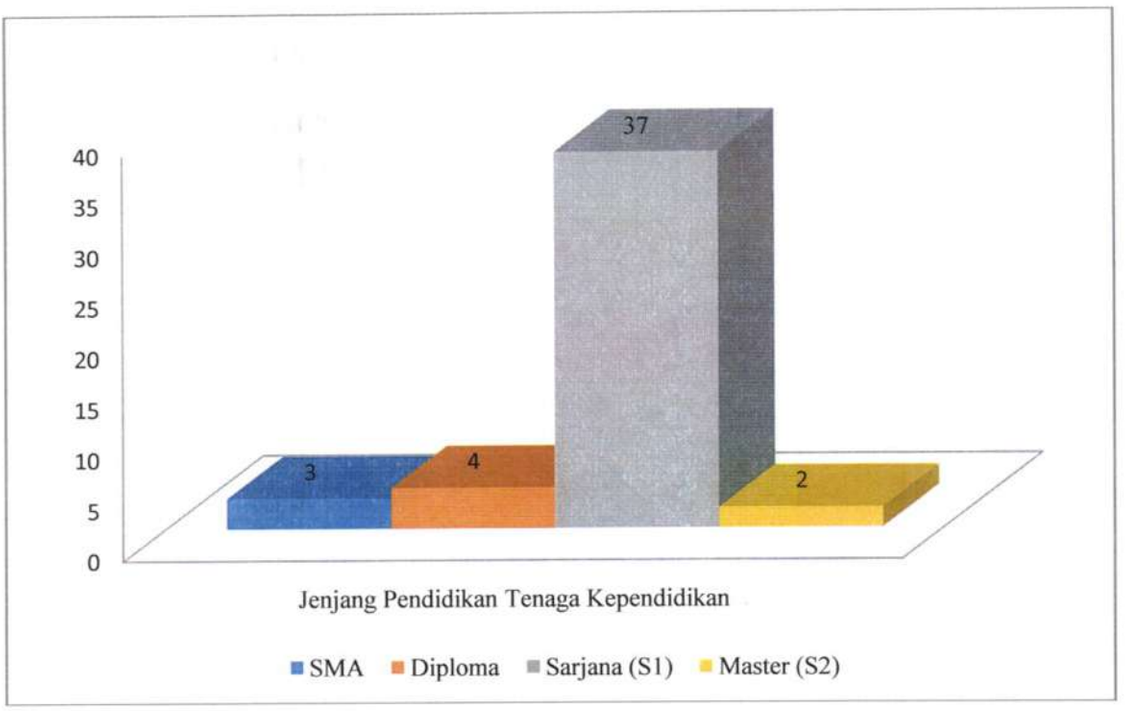

Gambar 9
Jumlah Anggaran Penelitian IAIN Pontianak

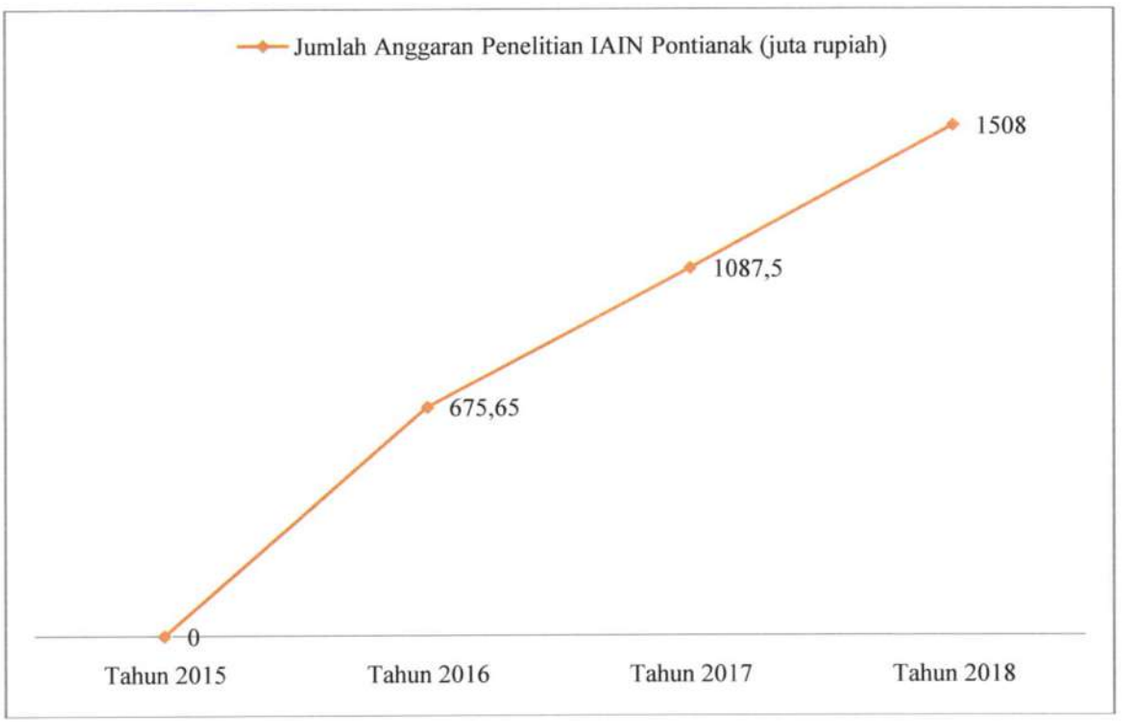

Gambar 10
Jumlah Judul Penelitian IAIN Pontianak

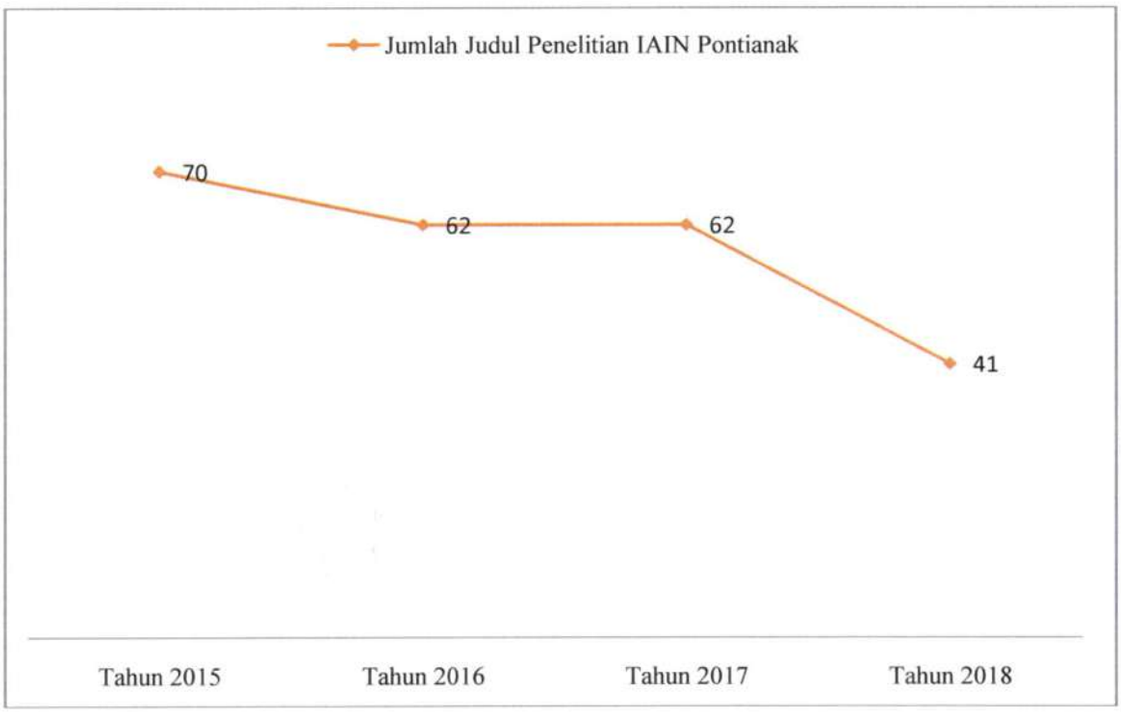

Gambar 11
Status Akreditasi Jurnal Ilmiah IAIN Pontianak

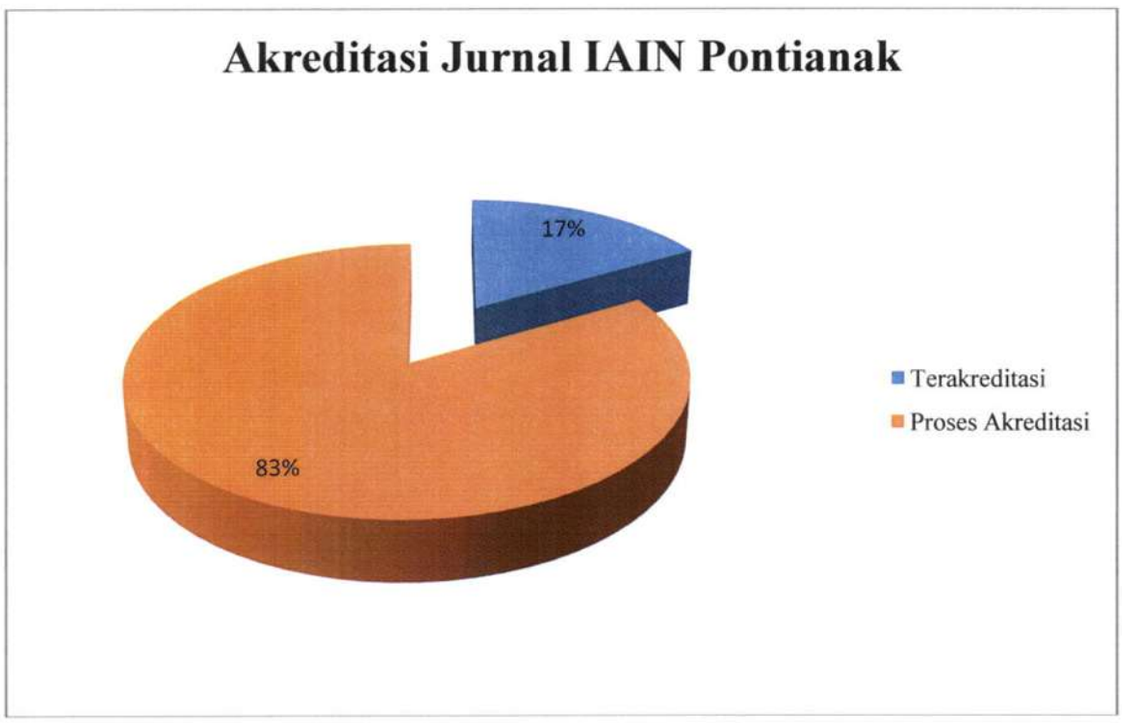

Gambar 12
Indeksasi Enam Jurnal IAIN Pontianak

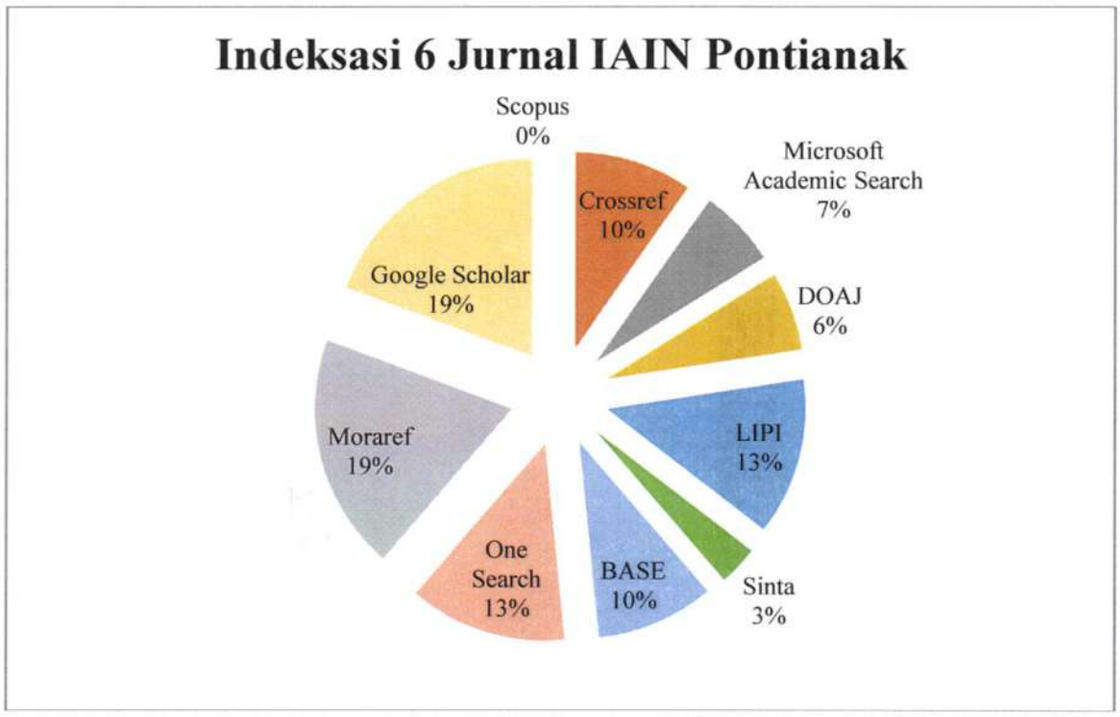

Gambar 13
Banyaknya Mahasiswa IAIN Pontianak

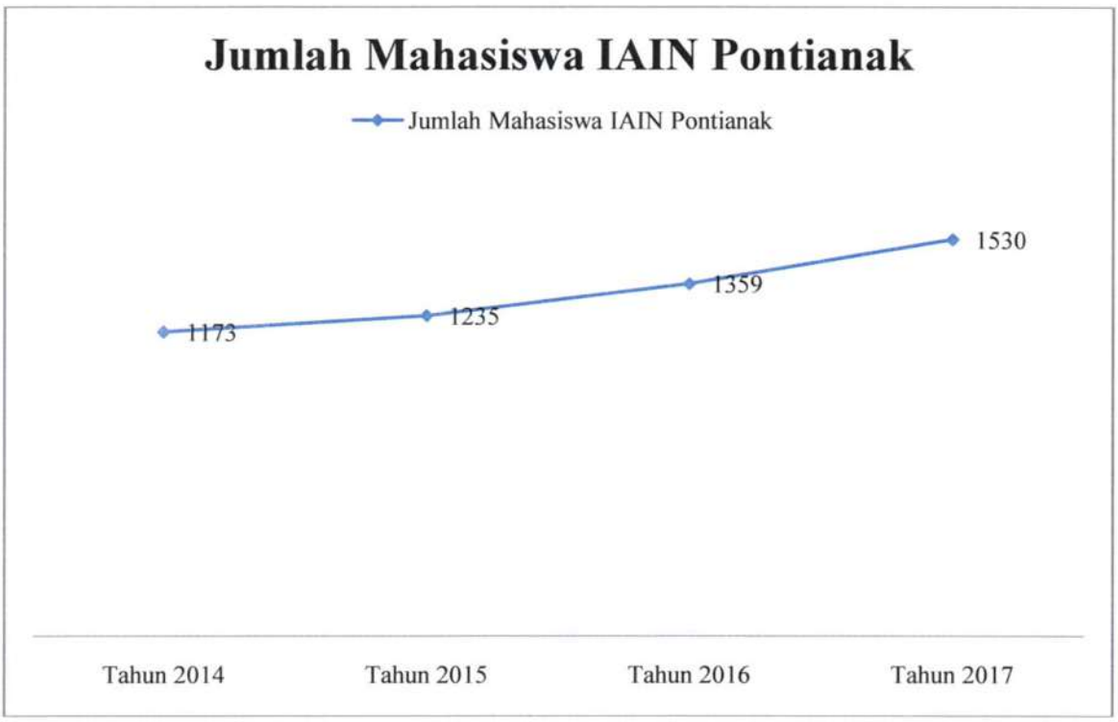

Gambar 14
Jumlah Mahasiswa IAIN Pontianak dari Tahun 2014-2018

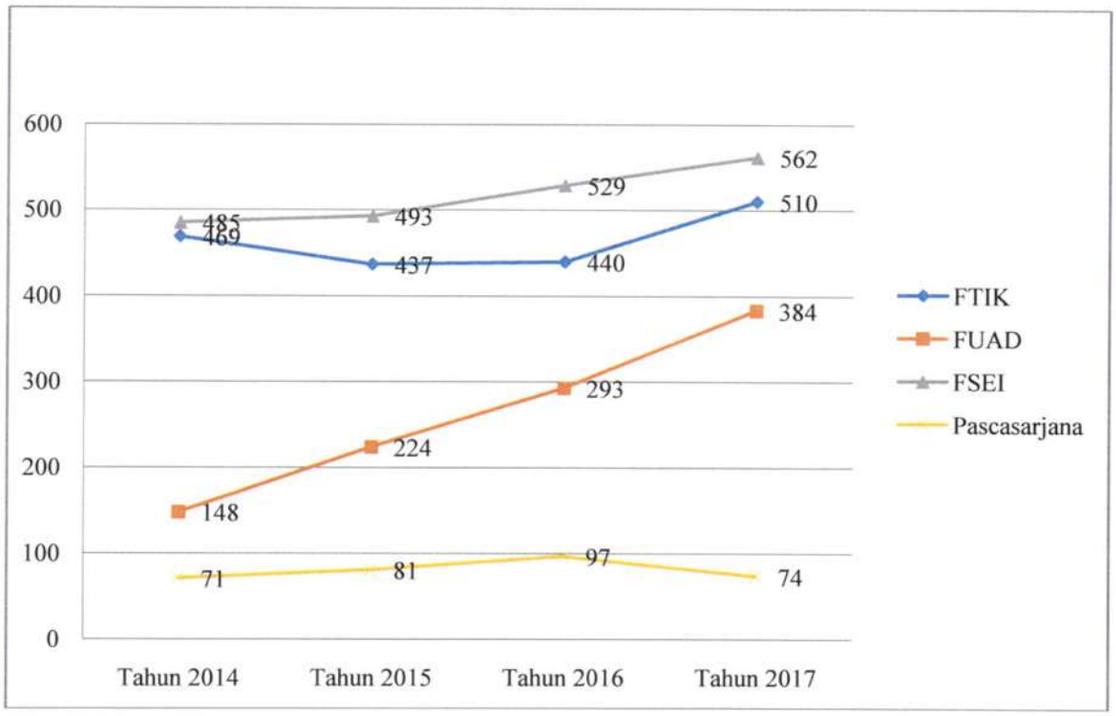

Gambar 15
Banyaknya Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

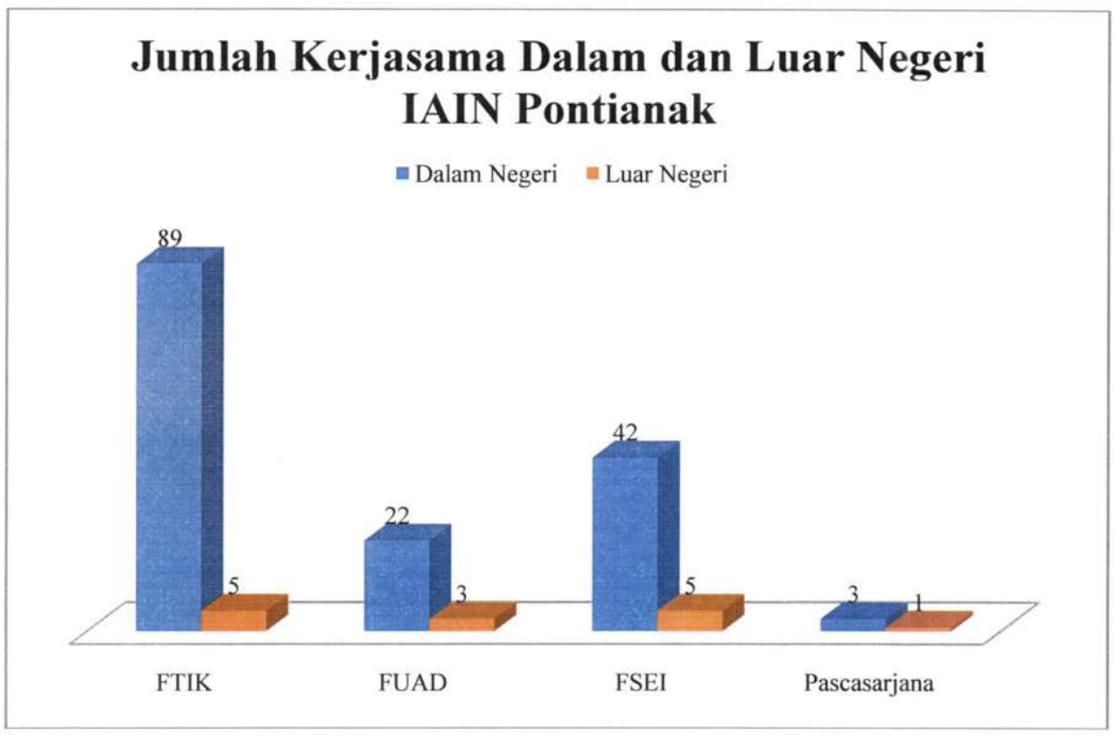

C. Deskripsi SWOT IAIN Pontianak

Berikut ini merupakan deskripsi tentang kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*oppurtunities*) dan ancaman (*threats*) bagi IAIN Pontianak di masa mendatang yang mencakap pembahasan tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Alumni, serta kelembagaan dan kerjasama.Setelahnya, deskripsi SWOT ini digunakan untuk menyusun program kegiatan dalam pencapaian visi ke depan secara bertahap/berkelanjutan sampai tahun 2022. Keberhasilan program dievaluasi secara bertahap/berkelanjutan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah dirumuskan.

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi
   a. Aspek Pendidikan dan Pengajaran

Tabel 2
SWOT Aspek Pendidikan dan Pengajaran

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• IAIN Pontianak merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di Kalimantan Barat, dan sejauh ini telah berperan sebagai Pembina bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) di Kalimantan Barat. • IAIN Pontianak sangat diminati oleh lulusan baik MA, SMA, maupun SMK baik negeri ataupun swasta. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya animo masyarakat dalam memilih IAIN Pontianak sebagai perguruan tinggi pilihan tempat belajar. • Variasi fakultas dan program studi sangat beragam. Adapun program Studi pada jenjang sarjana di Fakultas Tarbiyah dan	• SDM dosen dan tenaga kependidikan masih jauh dari memadai. • Untuk dosen dan tenaga kependidikan sedikit-demi sedikit telah teratasi dengan lowongan pengangkatan dosen sebagai CPNS dan Dosen Tetap Non-PNS di setiap tahunnya, namun jumlah pengangkata tersebut masih relative kecil dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang besar. • Masih minimnya jumlah dosen yang bergelar profesor/guru besar. • Fasilitas pendidikan belum memadai, seperti peralatan laboratorium dan ruang

Ilmu Keguruan, antara lain: (1) Pendidikan Agama Islam (PAI), (2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), (3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Pada fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) terdapat 6 program studi, antara lain; (1) Ekonomi Syariah (ES), (2) Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (HES), (3) Perbankan Syariah (PBS), (4) Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyyah (AS), Akuntansi Syariah (AKS), dan Manajemen Bisnis Syariah (MBS). Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah memilki beberapa prodi, yaitu: Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD), Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Ilmu al-Quran dan Tafsir (IAT), Studi Agama-Agama (SAA), dan Psikologi Islam (PI). Di Jenjang Program Pasca Sarjan (S2), terdapat dua program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), dan Ekonomi Syariah (ES). • Secara kuantitatif, tenaga dosen IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dari aspek kualifikasi dan jenjang pendidikan. Demikian pula tenaga kependidikan. Rinciannya untuk dosen: 37 Doktor, 76 Magister dan untuk tenaga kependidikan 2	kelas yang sebagian belum modern. • Minimnya kegiatan ilmiah, seperti konferensi, seminar, kuliah umum pada level internasional maupun nasional. • Masih banyak dosen yang mengajar bukan di bidang keahliannya. • Masih kurang dosen yang memiliki kemampuan menyusun buku ajaratau modul perkuliahan/praktikum sehingga pembelajaran/perkuliahan belum berlangsung secara optimal. • Kurangnya sosialisasi, sehingga banyak dosen yang mengajar tidak sesuai dengan kurikulum KKNI yang telah ditetapkan oleh program studi. • Saat ini akreditasi institusi IAIN Pontianak (AIPT IAIN Pontianak) belum dilakukan. Dari 18 Prodi yang ada (4 di FTIK, 6 di FSEI, 6 di FUAD, dan 2 di Pascasarjana), 1 prodi terakreditasi A, 9 prodi terakreditasi B, 3 prodi terakreditasi C dan 5 prodi dalam proses akreditasi.

orang bergelar master dan 37 orang bergelar sarjana, 4 orang llulusan diploma, dan tiga orang lulusan SMA. (terlampir). Jabatan fungsional dosen IAIN Pontianak dengan perincian sebagai berikut: 1 orang guru besar/profesor, 42 orang lektor kepala, 72 orang lektor, dan 9 orang asisten ahli. Mayoritas PNS dosen IAIN Pontianak telah tersertifikasi dan hanya sebagian kecil PNS dosen yang sedang dalam proses pengusulan sertifikasi. • Secara kuantitatif, tenaga kependidikan IAIN Pontianak telah mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama dari aspek kualifikasi dan jenjang pendidikan.. Rinciannya untuk tenaga kependidikan 2 orang bergelar master dan 37 orang bergelar sarjana, 4 orang llulusan diploma, dan tiga orang lulusan SMA. (terlampir). • Mayoritas program studi di IAIN Pontianak telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dengan perincian 1 prodi terakreditasi A, 9 prodi terakreditasi B, 3 prodi terakreditasi C dan 5 prodi dalam proses akreditasi. • Perpustakaan IAIN Pontianak merupakan menyediakan sumber belajara bagi mahasiswa secara	

memadai dan telah memperoleh akreditasi dari Lembaga Akreditasi Perpusatakaan Nasional dengan nilai akreditasi 'B". di Kalimantan Barat, perpustakan IAIN Pontianak merupakan satu-satunya perpustakan Perguruan tinggi yang terakreditasi. Kurikulum yang digunakan oleh IAIN Pontianak sudah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
▪ Tersedianya banyak sumber pendanaan studi lanjut bagi dosen berupa beasiswa, seperti beasiswa LPDP Kementerian Keuangan, beasiswa program 5000 Doktor Kementerian Agama, beasiswa DIPA IAIN Pontianak, dan lain-lain. ▪ Tersedianya pelatihan-pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatakan kemampuan baik dalam hal penguasaan bahasa asing maupun penguasaan teknologi pembelajaran. ▪ Teknologi yang berkembang semakin memudahkan pencarian seumber-sumber pembelajaran seperti; e-book, e-journal, dan lain-lain. ▪ Berkembangnya dunia pendidikan yang mendorong	• Tingkat selektifitas penerima beasiswa studi lanjut yang ketat dengan jumlah kuota yang terbatas serta banyaknya peminat dari perguruan tinggi lain sehingga tidak banyak dosen dan tenaga kependidika IAIN Pontianak yang lulus seleksi tersebut. • Kouta penerima sertifikasi bagi dosen setiap tahun minim, sehinnga banyak dosen yang belum tersertifikasi. • Terbatasnya dana IAIN Pontianak untuk mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan-pelatihan termasuk dalam menyelenggaran pelatihan-

kemajuan pendidikan tinggi sehingga ada rekruitmen dosen dan tenaga kependidika yang lebih selektif, seperti penggunaan CAT dalam seleksi CPNS dosen dan tenaga kependidikan. ▪ Fleksibilitas anggaran untuk menyempurnakan kurikulum KKNI melalui workshop dan FGD.	pelatihan tersebut secara mandiri. • Masing banyaknya dosen dan tenaga kependidikan yang belum familiar dalam menggunakan teknologi pembelajaran terkini, seperti *e-book, e-journal,* dan lain-lain. • Tingkat selektifitas rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan akan menyulitkan IAIN Pontianak mendapatkan SDM yang diperlukan sesuai dengan kouta yang dibutuhkan. • Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum KKNI

b. Aspek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Tabel 3
SWOT Aspek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• Kualifikasi keilmuan yang dimiliki oleh dosen IAIN Pontianak mencukupi untuk dapat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri. • Kreatifitas dan inovasi yang dimiliki dosen IAIN Pontianak sangat mendukung untuk	• Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat belum terpublikasi secara luas. Walaupun hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah ada yang dibukukan, namun publikasi masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan

melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. • Tersedianya banyak sumber pendanaan pendelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, dan lain-lain. • Tersedianya sistem informasi modern yang disediakan oleh Diktis dalam mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Litapdimas Diktis Kemenag RI.	terkait dengan dukungan finansial dari lembaga. • Sejauh ini, dosen lebih banyak menjalankan aktifitas kegiatan pembelajaran, sementara kegiatan tri dharma lainnya seperti penelitan dan pengabdian kepada masyarakat masih relative sedikit frekuensinya. • Masih kecilnya dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang tersedia. • Kuota penerima dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang sedikit berbanding terbalik dengan animo yang tinggi. • Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat masih lemah, dilihat dari belum seimbangnya proposal yang diterima untuk didanai dengan publikasi yang dihasilkan.
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
• Terbukanya kesempatan kerja sama antara IAIN Pontianak dengna perguruan tinggi lain, pemerintah, pihak swasta, LSM, ataupun kelompok masyarakat secara umum dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan ang dihadapi dalam bentuk kerjasama penelitian ataupun pengabdian	• Tingginya persaingan dalam memperoleh dana penelitian dan pengabdian masyarakat menjadikan kecilnya kesempatan dosen dalam memperoleh dana penelitian dan pengabdian masyarakat. • Tidak terdesiminasikan hasil penelitian dan pengabdian

masyarakat. • Banyaknya jurnal-jurnal baik dilingkungan IAIN Pontianak maupun di luar IAIN Pontianak sebagai wadah publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. • Tersedianya banyak sumber pendanaan pendelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak, dan lain-lain. • Perlunya perumusan standar mutu dan petunjuk teknis penelitian dan pengabdian ke dalam buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat.	masyarakat. • Rendahnya mutu publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat. • Terbatasnya kuota publikasi hasil penelitan dan pengabdian masyarakat pada jurnal terkareditasi dan terindeks baik di level nasional maupun internasional.

c. Kemahasiswaan dan Alumni

Tabel 4
SWOT Aspek Kemahasiswaan dan Alumni

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• Telah diterapkannyas sistem informasi akademik berbasis *online system*, sehingga memungkin mahasiswa dan alumni untuk mengakses informasi akademik dan informasi alumni secara luas dan mudah. • Banyaknya beasiswa yang disediakan baik dari IAIN Pontianak mapun pihak luas, seperti beasiswa BI, Telkom, Hafidz Quran, RS Joempa, dan	• Sebagian kecil program studi di IAIN Pontianak terakreditasi "C" sehingga memberikan efek pada menurunnya antusiasme mahasiswa dalam penyelesaian studinya. Hal ini berangkat dari kekhawatiran mereka, saat bersaing di pasar kerja. • Semakin bertambahnya daya tampung mahasiswa yang mengakibatkan

lain-lain. • Adanya tracer study yang dilakukan oleh IAIN Pontianak sehingga data alumni terkumpul dengan baik. • Ketatnya selcksi masuk IAIN Pontianak dan tingginya animo calon mahasiswa yang menghasilkan input mahasiswa yang berkualitas. • Tingginya kreatifitas dan motivasi yang mendukung minat dan bakat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan baik regular maupun ekstrakurikuler sehingga memberikan prestasi bagi IAIN Pontianak. • Telah adanya prosedur akademik mahasiswa yang mendukung birokrasi dan kejelasan efisiensi masa studi mahasiswa.	bertambahnya beban dosen. • Masih kurangnya kemampuan lulusan mahasiswa dalam menghadapi pasar kerja, terutama pekerjaan yang menggunakan teknologi informasi. • Masih sulitnya IAIN Pontianak dalam mengumpulkan masukan-masukan dalam *tracer study*. • Menurunkan kualitas input mahasiswa yang disebabkan oleh banyaknya jumlah daya tampung dalam jalur SPAN PTKIN.
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
• Semakin banyaknya sumber dana beasiswa yang disediakan oleh IAIN Pontianak dan pihak luar bagi mahasiswa IAIN Pontianak. • Tersedianya pelatihan-pelatihan di luar proses perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa di bidangnya maupun penguasaan kebahasaannya. • Terbukanya peluang untuk *career centre* bagi alumni yang memungkinkan terjembataninya alumni dengan pasar kerja. • Teknologi yang berkembang	• Selektifitas IAIN Pontianak dalam rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan sehingga menyulitkan alumni dalam memperoleh pekerjaan di IAIN Pontianak. • Promosi yang besar dan sistematis dari perguruan tinggi luar ke Kalimantan Barat akan mengurangi animo calon mahasiswa untuk masuk ke IAIN Pontianak. • Bergesernya sumber belajar mahasiswa dari sumber teks

semakin memudahkan dalam pencarian informasi tentang sumber-sumber belajar mahasiswa, sperti *e-book, e-journal,* dan lain-lain. • Berkembangnya dunia pendidikan tinggi yang mendorong kemajuan pendidikan sehingga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk studi lanjut.	ke sumber online mengakibatkan sebagian mahasiswa cenderung instan dan tidak tertarik pada sumber belajar berupa buku dan materi yang disampaikan oleh dosen di kelas. • Dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan bagi alumni perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) termasuk IAIN Pontianak.

2. Aspek Kelembagaan dan Kerja Sama
   a. Kelembagaan
      1) Perencanaan

Tabel 5
SWOT Aspek Perencanaan

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• Adanya aturan yang jelas dan banyaknya tenaga professional dalam merencanakan program-program kelembagaan di IAIN Pontianak. • Adanya *job decribtion* yang jelas sehingga memudahkan dalam merencanakan program IAIN Pontianak. • Adanya teknologi informasi yang memudahkan dalam merencanakan program yang lebih efektif dan terukur.	• Ketidaksediaan *long term comprehensive master plan* yang tidak saja untuk pengaturan lokasi gedung kuliah, laboratorium, administrasi, sarana olahraga, dan rekreasi tetapi juga *lanscape*nya. • Kurang tersedianya *database* yang memungkinkan perencanaan dibuat dengan cermat berbasis data.

	• Masih lemahnya sistem koordinasi dan sistem perencanaan fakultas, program pascasarjana, dan institut. • Renstra yang ada disusun tanpa adanya pada Rencana Induk Pengembangan (RIP), dan Rencana Operasional (Renop) IAIN Pontianak. • Masih lemahnya pengawasan internal di bidang perencanaan yang dilakukan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
• Fleksibelitas anggaran memungkinkan IAIN Pontianak dalam membuat *long term comprehensive master*. • Tersedianya SDM dan aplikasi pendukung yang memungkinan tersedianya *data base* perencanaan. • Tersedianya ruang-ruang rapat yang memadai dan grup media-media social untuk memudahkan komunikasi antar lembaga. • Fleksibelitas anggaran memungkinkan IAIN Pontianak dalam menyusun RIP dan Renop. • Tersedianya SDM dan Lembaga Penjamin Mutu yang memungkinkan untuk membentuk Satuan Pengawasan	• Ketergantungan pada pendapata yang berasal dari mahasiswa masih cukup tinggi. • Belum transparansiya dana pendidikan di tingkatan Institut maupun fakultas. • Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi dijajarannya (dalam hal ini kementerian agama) untuk meningkatkan daya saing memungkinka terjadinya persaingan tidak sehat antar perguruan tinggi. • Semakin banyak PTKI di Indonesia baik yang negeri maupun swasta yang dikelola lebih professional

Internal (SPI).	dan mengembangkan program studi lebih kompetitif.

2) Sistem Informasi

Tabel 6
SWOT Aspek Sistem Informasi

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• IAIN Pontianak telah menerapkan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML). • Tersedianya SDM di IAIN Pontianak dalam pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	• Tidak memadainya jumlahnya SDM yang ada di IAIN Pontianak dalam pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML). • Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem

(SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML).	Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML) belum bisa disebut sebagai system yang handal karena belum terintegrasi antara satu dengan yang lain. • Kurangnya sarana atau fasilitas yang modern yang mendukung terintegrasinya sistem informasi di IAIN Pontianak, yaitu Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan

	Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML).
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
• Fleksibilitas anggaran memungkinkan IAIN Pontianak untuk menyempurnakan pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML). • Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat memungkinkan integrasi semua system yang ada, yaitu Sistem Informasi Akademik (SIAKAD),	• Tanpa satuan pengawas internal yang berjalan baik pada tataran perencanaan dan implementasi, sistem informasi yang terintegrasi dan komprehensif (*comprehensive and integrated information system*) tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. • Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi dijajarannya (dalam hal ini kementerian agama) untuk meningkatkan kualitas sistem informasi kelembagaan. • Semakin banyak Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia baik yang negeri maupun swasta yang sistem informasinya dikelola lebih

Sistem Akuntasi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (SIMPUS), Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (SIMPPM), Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan (SIMKPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIML).	professional dan modern.

3) Tata Kelola

Tabel 7
SWOT Aspek Tata Kelola

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• Telah ada sistem tata kelola birokrasi dan administrasi di IAIN Pontianak • Telah ada sistem tata kelola keuangan di IAIN Pontianak. • Telah ada sistem tata kelola aset di IAIN Pontianak. • Telah ada sistem tata kelola kerumahtanggan di IAIN Pontianak. • Tersedia SDM yang mengelola birokrasi dan administrasi, keuangan, pendataan aset, dan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak dengan kapabilitas, integritas dan komitmen tinggi	• IAIN Pontianak belum memiliki POB yang komprehensif, rinci dan terintegrasi yang disahkan sebagai acuan dalam mengatur jalannya birokrasi dan administrasi. • Pengelolaan administrasi di kepegawaian masih dilakukan secara manual sehingga hak-hak kepegawaian, seperti kenaikan pangkat dan jabatan seringkali mengalami keterlambatan. • Kurang representatifnya

dalam kerja.	sarana dan fasilitas yang ada sehingga tata kelola di IAIN Pontianak masih berjalan secara manual dan belum modern. • Kurang representatifnya sarana dan fasilitas yang ada sehingga tata kelola di IAIN Pontianak masih berjalan secara manual dan belum modern. • Sering terjadi kesalahan dalam pendataan asset, akibat kurangnya mutu tata kelola aset yang ada di IAIN Pontianak. • Pengelolaan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak masih berjalan secara konvensional, belum terencana baik dan belum terintegrasi satu dan yang lain.
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
• Kemajuan sistem teknologi dan informasi saat ini memungkinkan pembangunan sistem informasi kepegawaian yang modern. • Dalam tata kelola keuangan, terbuka peluang IAIN Pontianak ditetapkan sebagai PK-BLU. • Fleksibelitas anggaran yang membuka peluang bagi IAIN Pontianak untuk melakukan reinovasi tata kelola, sehingga	• Tanpa tata kelola birokrasi dan administrasi yang baik, kepemimpinan berlangsung sentralistik dan pelayanan administrasi akan berjalan secara lambat. • Tanpa tata kelola keuangan yang baik, pola pengelolaan keuangan yang ada di IAIN Pontianak akan mengalami kendala-kendala mulai dari

tata kelola yang ada bisa berjalan secara optimal dengan sistem yang lebih modern.	perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan. • Tanpa tata kelola aset yang baik, yang terjadi akan banyak nota distribusi yang tidak lengkap, dan asset-aset yang terlantarkan. • Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi dijajarannya (dalam hal ini kementerian agama) untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan. • Semakin banyak Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia baik yang negeri maupun swasta yang dikelola lebih professional dan modern baik dalam hal birokrasi, administrasi, keuangan, pendataan aset dan kerumahtanggaan.

b. Kerja Sama

Tabel 8
SWOT Aspek Kerja Sama

Kekuatan (*Strengths*)	**Kelemahan (*Weaknesses*)**
• Hubungan kerjasama IAIN Pontianak yang baik dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan kota, lembaga-lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi dalam dan luar	Belum adanya *international office*, yang penting untuk meningkatkan kepercayaan pihak luar negeri termasuk dalam mendukung peningkatan kuantitas jumlah

negeri memungkinkan pengembangan kerjasama IAIN Pontianak dalam berbagai bentuk dan level kerjasama, seperti misalnya KKL integratif, KKL di perbatasan Indonesia-Malaysia, kerjasama dalam konferensi internasional, mendatangkan *visiting doctor/visiting professor* dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri dalam rangka stadium general dan seminar, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya. • Telah ada kesepakatan kerjasama dalam bentuk tertulis (MoU dan MoA) antara IAIN Pontianak dengan pemerintah daerah dan kota, lembaga-lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.	mahasiswa internasional ke IAIN Pontianak dan atau visitng doctor/ visiting professor dari pergurian tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
Peluang (*Oppurtunities*)	**Ancaman (*Threaths*)**
Fleksibilitas anggaran memungkinkan adanya alokasi anggaran untuk membangun international office, sehingga dapat terjalin kerjasama dengan international agencies dan koordinasi dengan pihak-pihak perguruan tinggi, termasuk dalam memperoleh dana-dana international yang lazim berasal dari *international agencies*.	• Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi di jajarannya (dalam hal ini kementerian agama) untuk meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan, baik antar perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. • Semakin banyak Perguruan Tinggi Umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia baik yang negeri

	maupun swasta yang telah menjalin kerjasama yang baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri.

V. ARAH, KEBIJAKAN STRATEGIS, DAN PROGRAM IAIN PONTIANAK TAHUN 2018-2022

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan IAIN Pontianak 2018-2022 yaitu:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, regional, dan internasional melalui pemberdayaan sumber daya dan budaya lokal.
2. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upayamengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam.
3. Memberikan layanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.
4. Membangun citra IAIN yang bersih dan berwibawa berlandaskan *good governance.*
5. Menyediakan sumber pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen berasal dari UNDP, Diktis, DIPA IAIN Pontianak.
6. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah.
7. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi IAIN Pontianak.
8. Memfasilitasi dosen dalam mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat melalui sistem informasi modern Litabdimas Diktis Kemenag RI.
9. Menyediakan sistem informasi akademik berbasis *online system,* sehingga memungkinkan mahasiswa dan alumni untuk mengakses informasi secara luas dan mudah.
10. Menyediakan sistem tata kelola birokrasi dan administrasi di IAIN Pontianak.
11. Menyediakan sistem tata kelola keuangan di IAIN Pontianak.
12. Menyediakan sistem tata kelola aset di IAIN Pontianak.

13. Menyediakan sistem tata kelola kerumahtanggaan di IAIN Pontianak.
14. Menyediakan sistem tata kelola kerumahtanggaan di IAIN Pontianak.
15. Menyediakan SDM yang mengelola birokrasi dan administrasi, keuangan, pendataan aset, dan kerumahtanggaan di IAIN Pontianak dengan kapabilitas, integritas dan komitmen tinggi dalam kerja.

Secara khusus untuk tahun 2018 arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak di fokuskan pada beberapa hal yaitu:

1. Optimalisasi dan pembenahan Ortaker.
2. Peningatan sarana dan prasarana.
3. Pengembangan lembaga.
4. Pengembangan akademik.
5. Pengembangan sumber daya manusia.

B. Kebijakan Strategis

1. Kebijakan Stratcgis dalam meningkatkan akses pendidikan IAIN Pontianak berupa:
   a. Memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang bermutu secara merata.
   b. Pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa berprestasi.
   c. Pengembangan fasilitas pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan.
   d. Menyediakan beasiswa *Tahfidz al-Qur'an.*
   e. Menyediakan beasiswa Bank Indonesia.
   f. Menyediakan beasiswa Telkom.
   g. Menyediakan beasiswa Rumah Sakit Joempa.
   h. Penyeleksian mahasiswa baru, melalui jalur undangan, mandiri dan SBM PTN.
2. Kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan IAIN Pontianak berupa:
   a. Mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
   b. Mewujudkan kampus yang asri dan lestari.
   c. Peningkatan koleksi dan prasarana perpustakaan.
   d. Peningkatan sarana dan prasarana.
   e. Meningkatkan mutu akademik.

f. Peningkatan akreditasi minimal B bagi program studi yang ada di lingkungan IAIN Pontianak.
g. Peningkatan mutu lembaga kemahasiswaan.
h. Mengadakan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan kota, lembaga-lembaga keagamaan, dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
i. Menjadi mitra aktif pemerintah dalam pembangunan masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Kebijakan strategis dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak berupa:
   a. Sertifikasi dosen.
   b. Pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non ASN.
   c. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam maupun luar negeri.
   d. Peningkatan kompetensi dosen.
   e. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional.
   f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen.
   g. Pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presentrasi makalah AICIS.
   h. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
   i. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2.
4. Kebijakan strategis IAIN Pontianak dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian berupa:
   a. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional.
   b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi internasional (ter-*index* Scopus).
   c. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
   d. Penguatan budaya *research*.
   b. Menyediakan fasilitas karya dosen berupa buku, jurnal berbasis *link*
5. Kebijakan strategis IAIN Pontianak dalam meningkatkan kualitas dan jenis hasil pengabdian kepada masyarakat berupa:
   a. Penguatan kelembagaan SDM pengabdian kepada masyarakat.
   b. Maksimalisasi pengabdian kepada mayarakat yang berbasis pembelajaran, penelitian, dank ke-Borneo-an.
   c. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik.

6. Kebijakan strategis Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi berupa:
   a. Penguatan perencanaan tri dharma dan tata kelola dengan pemanfaatan TIK.
   b. Penguatan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.
   c. Peningkatan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perencanaan dan kerjasama dengan pemanfaatan TIK.
   d. Penguatan infrastruktur dan suprastruktur system informasi.
7. dalam meningkatan hasil inovasi di IAIN Pontianak berupa:
   a. Peningkatan kerjasama untuk program pemagangan bagi mahasiswa.
   b. Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional dan internasional.

C. Program Pengembangan IAIN Pontianak 2018-2022

2. Elemen Pendidikan, yaitu:
   a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran serta lingkungan kerja dosen.
   b. Inisiasi kuantitas doktor sesuai dengan kebutuhan pengembangan keilmuan di lingkungan IAIN Pontianak.
   c. Akselerasi guru besar.
   d. Visiting professordari perguruan tinggi dalam dan luar negeri dalam rangka *studium general* dan seminar, dan kerjasama.
   e. Vitalisasi regulasi standar penjaminan mutu akademik.
   f. Inisiasi dan fasilitasi penulisan dan penerbitan buku ajar.
   g. Fasilitasi kualitas dan kwantitas jurnal internal.
   h. *Digital library.*
   i. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat dan pengembangan hasil riset.
   j. Transliterasi literatur babon.
   k. Penyetaraan kualitas *input* dan pembentukan karakter mahasiswa baru.
   l. Pelaksanaan standarisasi kualitas proses pembelajaran dan pelayanan untuk mendapatkan peningkatan suasana akademik.
   m. Penguatan kelembagaan dan pendanaan LPM.
   n. Terlaksananya akreditasi institusi, program studi,d an inisiasi.

o. Pembukaan program studi baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan keilmuan dan penguatan serta pemekaran fakultas di lingkungan IAIN Pontianak.
p. Redistribusi dosen sesuai kebutuhan pengembangan program studi.

3. Elemen Penelitian
   a. Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan perencanaan penelitian sesuai visi dan misi IAIN Pontianak serta kebutuhan masyarakat.
   b. Fasilitasi kuantitas penelitian berbasis pengembangan keilmuan dan kebijakan berwawasan keborneoan.
   c. Inisiasi dan fasilitasi penulisan artikel yang diterbikan dalam jurnal terakreditasi dan/atau jurnal internasional ter-*index* Scopus.
   d. *Onlining* karya ilmiah dosen.
   e. Penguatan kompetensi SDM dan pengembangan fasilitas pendukung.
   f. Peningkatan alokasi dana penelitian.
   g. Membangun atmosfer penelitian dan menstimulasi peneliti untuk menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, paten dan hak cipta.
   h. Monitoring, evaluasi dan umpan balik kegiatan penelitian.
4. Elemen Pengabdian Kepada Masyarakat
   a. Penguatan LP2M dan perencanaan LP2M yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan hasil riset untuk membantu terciptanya peluang kerja dan peluang usaha.
   b. Integrasi pengelolaan pembelajaran berbasis pengabdian pada masyarakat.
   c. Penguatan SDM pengabdian pada masyarakat.
   d. Maksimalisasi program pengabdian berorientasi kajian ke-Borneo-an.
   e. Peningkatan alokasi anggaran pengabdian pada masyarakat baik bersumber dari PNBP, BOPTN dan penggalian dana pengabdian pada masyarakat dari pihak ketiga.
   f. Monitoring, evaluasi dan umpan balik kegiatan.
5. Elemen Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
   a. Penyusunan *masterplan* pengembangan gedung dan landskap IAIN Pontianak.
   b. Penguatan sistem perencanaan yang memenuhi standar pengelolaan serta kebutuhan seluruh aspek pengembangan melalui pemanfaatan TIK.

c. Optimalisasi penggalian dana.
d. Penguatan Rencana BisnisAnggaran.
e. Monitoring, evaluasi dan umpan balik kegiatan.
f. Penguatan kerjasama dalam negeri dan pengalokasian anggaran.
g. Penguatan perencanaan dan pendanaan kerjasama dalam negeri dan struktur kelembagaan.
h. Penguatan perencanaan kerjasama luar negeri, struktur kelembagaan dan fasilitas pendukung.
i. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
j. Pengembangan dan pemantapan sistem informasi yang handal dan terintegrasi.
k. Pengembangan SDM sistem informasi yang berkompeten.
l. Pengembangan fasilitas sistem informasi untuk menunjang pemantapan sistem informasi.
m. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

6. Peningkatan Mutu Elemen Tatakelola, di antaranya:
   a. Penguatandan pengembanganTata Kelola Birokrasi dan Administrasi.
   b. Penyeimbangan desentralisasi kepemimpinan dan pengawasan melekat di IAIN Pontianak.
   c. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.
   d. Penguatan dan pengembangan tata kelola kepegawaian.
   e. Penguatan dan pengembangan tata kelola keuangan.
   f. Penguatan dan pengembangan tata kelola aset.
   g. Penguatan system keamanan kampus.
   h. Peningkatan kebersihan kampus.
   i. Peningkatan kenyamanan kampus.
   j. Penguatan dan pengembangan tata kelola ULP dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berbasis TIK.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 September 2018

REKTOR,

Dr. SYARIF, S.Ag, MA
NIP. 197105241998031001